



Buletin Parlementaria

Nomor 1055/IV/V/2019 • Mei 2019



Rutan Siak Perlu Pembenahan



9 772614 339005



16 Komisi X Minta Kuota dan Nilai Beasiswa Bidikmisi Ditingkatkan



6 Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Rutan Siak Perlu Pembenahan

Peredaran narkoba, over kapasitas, serta sarana yang tidak sesuai standar menjadi sumber masalah di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Rutan yang beberapa waktu lalu diguncang kebakaran akibat kerusakan warga binaannya itu perlu pembenahan menyeluruh. Komisi III DPR RI pun meninjau langsung kondisi terakhir Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Rutan Siak ini mempertanyakan kronologi kerusakan warga rutan kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Kapolda Riau. “Apa upaya pemulihan kondisi keamanan di Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura serta upaya pengejaran dan penangkapan para tahanan yang melarikan diri,” tanya Erma di Rutan Siak, Riau, Kamis (16/5).

Komisi III DPR RI mengimbau agar laten kerusakan berupa peredaran dan penyelundupan narkoba, kondisi *over capacity*, serta sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar bisa diselesaikan dengan baik. Komisi III DPR RI juga berharap, kerusakan dapat diantisipasi sehingga peristiwa serupa di rutan dan lapas lainnya di wilayah Riau tidak terulang kembali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi III DPR RI bahwa kerusakan berawal saat Kasat Narkoba Polres Siak beserta timnya mengecek rutan dan menemukan narkoba. Petugas lapas lantas membawa tiga napi yang diduga terlibat. Saat ketiga napi tersebut dibawa, spontan banyak warga binaan marah dan pintu sel masing-masing didobrak. Bahkan, ada pintu sel yang jebol dan hancur. Para napi pun berhamburan keluar. Rutan pun akhirnya dikuasai para napi.

Para napi melemparkan sejumlah



Tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di pimpin Erma Suryani Ranik saat meninjau bekas kerusakan di rutan kelas II B. Foto: Gerardi

benda ke arah luar. Api mulai menyala melalap bagian depan sampai tengah rutan. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB. Menurut laporan Kakanwil M. Diah, kerusakan terjadi pada pukul 04.15 WIB. Ada sekitar 180 warga binaan yang menyerahkan diri dan dievakuasi ke halaman depan Rutan Siak. Lalu pukul 05.15 WIB, Karutan, Kepolisian, dan TNI melakukan mediasi terhadap warga binaan yang masih berada di dalam rutan. Pukul 06.00 WIB, situasi baru dapat dikendalikan petugas keamanan.

Erma menekankan pentingnya pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai permasalahan yang dihadapi warga binaan seperti over kapasitas dan pola pembinaan warga memang harus kembali dibenahi. Ini penting agar kasus kerusakan tak terulang lagi. “Penanganan kasus di Riau ini sudah dua kali, 2017 di Pekanbaru, kemudian 2019 di Siak. Nah, ini merupakan peringatan keras untuk kita bersama. Kita harus benahi sistem pemasyarakatan, termasuk mengatur

daya dukung teman-teman dari institusi lain seperti Polda,” tandas Erma.

Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura merupakan rutan dengan kapasitas 128 orang. Saat ini, rutan tersebut dihuni 648 orang. “Tentu saja ada beberapa catatan buat kami, sebagai mitra kerja. Catatan saya, persoalan penghuni lapas yang sangat over kapasitas ini mendorong terjadinya tindak pidana kerusakan, kebakaran, dan pemakaian narkoba di dalam rutan. Ini jadi bagian rapat kerja kita dengan Menkum HAM, sekaligus membahas RUU Pemasyarakatan,” jelas Erma.

Sementara itu Kakanwil Kemenkum HAM Riau M. Diah menyebutkan, rutan paling over crowded tingkat nasional ada di Riau, yaitu di Kota Bagansiapi-api. Revitalisasi total lapas harus segera dilakukan. Sementara Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo mengatakan, akan bersinergi dengan semua pihak untuk menciptakan keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. ■ eko/mh/sf



Fadli Zon Luncurkan Buku “Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meluncurkan buku terbarunya yang berjudul “Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy”. Buku ini berisi koleksi pidato dan makalahnya dalam berbagai forum internasional, selaku Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sejak tahun 2014.

“Diplomasi Parlemen di tingkat dunia, merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang saya emban selaku Pimpinan DPR Bidang Korpolkam. Terlebih, di bawah saya ada juga BKSAP,” ujar Fadli saat peluncuran buku terbarunya di Ruang Abdul Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, buku ini menjadi bukti fungsi baru DPR RI, yaitu diplomasi parlemen. Tugas dan fungsi tersebut tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), selain fungsi legislasi, pengawasan

dan anggaran. “Sehingga, diplomasi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri. Namun, juga tugas dari parlemen dan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Fadli.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V ini berharap diplomasi parlemen mampu membantu mewujudkan hakikat politik luar negeri Indonesia, yaitu memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. “Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan bersama BKSAP yang ada di bawah koordinasi saya, khusus dalam rangka memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat dunia,” pungkas Fadli.

Hadir dalam acara peluncuran buku tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, eks Menteri Luar Negeri 2001-2009 Hassan Wirajuda, eks Ketua LIPI Lukman Hakim, sejumlah Duta Besar negara sahabat dan tamu undangan. ■ pun/sf



Peluncuran buku terbaru Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang berjudul “Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy” di Ruang Abdul Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5) Foto: Oji



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianje Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Geraldii Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumasri Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

Paripurna DPR Terima Laporan KEM-PPKF 2020



Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto Menerima Laporan KEM-PPKF 2020 dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Ruang Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Senin (20/5). Foto: Arief

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2020. Dalam Rapat Paripurna ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporannya terkait rencana pembangunan ekonomi di tahun mendatang. Setelah ini, fraksi-fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan KEM-PPKF tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani di hadapan Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5), fokus pemerintah di tahun mendatang akan menjaga pemulihan investasi dan ekspor dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli stabilitas harga dan perkuatan kepercayaan konsumen.

Dengan mempertimbangkan

berbagai potensi kesempatan dan resiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun mendatang, kepada DPR RI, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro RAPBN 2020 yakni pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6 persen, inflasi 2,0 sampai 4,0 persen, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan yakni 5,0 sampai 5,6 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah yakni Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 60-70 dollar AS per barel, *lifting* minyak bumi yakni 695-840 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.191- 1300 ribu barel setara minyak per hari.

Sebagai pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menurut Menkeu Sri Mulyani, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 desain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian

target pembangunan ekonomi baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Pemerintah juga masih akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menghadapi kelemahan global dan menjaga momentum pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Menyikapi laporan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto akan menginstruksikan seluruh fraksi di DPR RI untuk memberikan catatan dan masukan terhadap KEM-PPKF ini. "Karena berdasarkan pasal 155 ayat 4 Peraturan DPR tentang Tata Tertib disebutkan fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan pemerintah," ujar Utut. Berdasarkan kesempatan Rapat Bamus tanggal 16 Mei 2019, pandangan fraksi atas KEM-PPKF ini nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan tanggal 28 Mei 2019 mendatang. ■ hs/sf

Ketua DPR Ajak Anak Yatim Doakan Bangsa Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memotivasi para anak yatim agar tetap tegar mengejar cita-cita. Di tangan merekalah, masa depan Indonesia terletak. Tak perlu takut menghadapi kehidupan, karena dengan kerja keras, doa dan usaha, Insya Allah berbagai cita-cita yang baik akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

“Anak-anakku sekalian tidak perlu berkecil hati. Saat kecil, bapak juga sudah ditinggal oleh ayah. Allah pasti punya rencana dan maksudnya tersendiri kenapa memanggil orang tua kita terlebih dahulu. Hidup harus tetap berjalan, sebagai anak yang berbakti, kita harus mendoakan para orang tua yang telah menghadap Allah,” ujarnya

saat buka puasa bersama ratusan anak yatim di Senayan, Jakarta, Jumat (17/5).

Tak lupa legislator dapil Jawa Tengah VII yang akrab disapa Bamsuet ini juga meminta doa para anak yatim agar bangsa Indonesia tetap jaya. Selain itu, Bamsuet juga meminta anak yatim mendoakan dirinya agar bisa menuntaskan amanah dengan baik sebagai Ketua DPR RI yang hanya tinggal hitungan beberapa bulan lagi.

“Berbagai usaha merekatkan persaudaraan sebangsa telah dilakukan. Insya Allah dengan adanya doa dari anak-anakku sekalian, bangsa kita tetap bersatu, tidak terpecah belah. Bapak juga mohon doanya agar bisa menuntaskan amanah sebagai Ketua

DPR RI dengan sebaik-baiknya,” tutur Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini tak lupa mengajak berbagai pihak agar memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Tidak hanya di Ramadan saja, melainkan juga di bulan-bulan selanjutnya. Ia menekankan, perhatian tidak harus berbentuk santunan saja. Namun yang paling penting adalah memberikan perhatian.

“Sehingga mereka bisa hidup tanpa kekurangan kasih sayang. Insya Allah, kelak dari para anak-anak yatim ini akan lahir para pemimpin yang amanah, para sarjana yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga bisa mendorong kemajuan Indonesia,” pungkas Bamsuet. ■ jk/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat buka puasa bersama ratusan anak yatim di Senayan, Jakarta, Jumat (17/5). Foto: Jaka

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan Bakesbangpol sebagai satu instrumen yang ada di pemerintahan baik itu provinsi maupun tingkat kabupaten kota, tentu memotret secara jelas baik sejak persiapan pada saat pelaksanaan, maupun setelah pencoblosan. Masukan-masukan itu akan sangat berguna dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu Kepala Bakesbangpol Jawa Timur Jonathan Judyanto menyampaikan secara keseluruhan proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Jawa Timur berjalan dengan lancar, aman, kondusif, sampai dengan perhitungan di tingkat provinsi. Secara legalitas, juga berjalan baik dengan memiliki tingkat kepercayaan dan partisipasi yang sangat tinggi.

“Saya kira dari sisi mekanisme dan pemenuhan administrasinya perlu disederhanakan, tentu saja dengan tidak mengurangi kualitas dari pada penyelenggaraannya. Terlalu banyak *form-form* yang harus diisi, sehingga sangat melelahkan. Tingkat kesalahannya akan tinggi, kalau petugas dibebani terlalu banyak isi *form* mengingat tidak semua petugas KPPS memiliki kualitas dan kemampuan yang sama. ■ es/sf



Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5). Foto: Erman

Komisi II Desak Pemerintah Tingkatkan Anggaran Ombudsman



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh beserta Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI bertemu dengan jajaran Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (15/5). Foto: Azka

Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan anggaran Ombudsman di setiap provinsi. Diketahui saat ini di setiap provinsi anggaran Ombudsman hanya sebesar Rp 700 juta rupiah. Bahkan Ombudsman juga belum memiliki kantor sendiri, statusnya saat ini masih sewa lahan. Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pemerintah untuk menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman agar kewenangannya tidak hanya mengawasi, tetapi bisa bertindak.

“Kita sudah menjembatani untuk meningkatkan anggaran Ombudsman. Kita juga sudah mengagendakan dengan beberapa *stakeholder* yang berkaitan dengan masalah ini untuk segera dibahas. Karena ini menyangkut dengan pelayanan publik, jadi harus

kita prioritaskan,” ungkapnya setelah memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI bertemu dengan jajaran Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (15/5).

Ninik, sapaan akrab Nihayatul juga mengatakan, setiap tahun DPR RI selalu mengusulkan agar selalu meningkatkan anggaran Ombudsman, tetapi selalu *mandek* di Kementerian Keuangan. Ia juga berharap Pemerintah menjadikan Ombudsman lebih kuat lagi, “Jangan sampai Ombudsman tidak ada di tingkat kabupaten kota, sehingga ketika masyarakat mendapatkan laporan-laporan sangat sulit sekali jika tidak ada pihak Ombudsman di kabupaten kota,” pungkas legislator Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebagaimana di ketahui Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan

publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan, dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, usai meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jateng, Ninik menilai masih ada persoalan dalam perekaman data KTP-elektronik, yakni waktu perekaman KTP-el sampai keluar membutuhkan waktu satu minggu. Persoalan tersebut berasal dari *server* pusat yang sering mengalami *down*. “Karena mekanismenya ketika masyarakat melakukan perekaman, itu harus dikirim terlebih dahulu datanya ke *server* Dukcapil Pusat untuk memastikan datanya valid atau tidak,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan ini, politisi dapil Jawa Timur ini nantinya akan berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk melihat bagaimana sebenarnya proses *server* yang ada di pusat. Sehingga nantinya bisa mempercepat pembuatan KTP-el dari perekaman hingga jadi. “Sebetulnya jika hanya proses perekaman hanya butuh waktu 5 menit, pengiriman data ke *server* pusat yang membuat lama prosesnya,” analisa Ninik. ■ **azk/sf**

Komisi II Berduka Atas Wafatnya Petugas Pemilu

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan turut berduka dan menaruh empati yang mendalam atas wafatnya para petugas ataupun yang jatuh sakit saat menjalankan tugasnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 lalu, baik dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun jajaran aparat pengamanan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Polda Jawa Barat, di Bandung, Jabar, Kamis (16/5).

“Komisi II DPR RI menegaskan bahwa petugas Pemilu yang wafat

atau sakit adalah para pejuang demokrasi. Oleh karena itu, jatuhnya korban jiwa dan sakit menjadi bahan evaluasi khusus bagi Komisi II DPR RI, sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Perundang-undangan dan Peraturan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelas Herman.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam Kunspek ini pihaknya ingin menggali informasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk data para korban, kronologis kejadian, beserta anggota keluarganya. Ia berharap ke depan Anggota KPU di semua tingkatan memiliki kemampuan, kredibilitas, integritas, dan memberikan kepercayaan terhadap publik.

“Tentu kami memberikan apresiasi. Kami lihat Polda Jabar dan Kejaksaaan Tinggi semuanya memberikan daya dukung yang baik. Mudah-mudahan ke depannya Pemilu kita bisa letakkan

pada peraturan yang lebih baik lagi, supaya menjamin pemilu itu damai, adil, jujur, dan *legitimate*,” harap legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, dalam pemaparannya Wakapolda Jabar Brigadir Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus menyatakan strategi yang dilakukan Polda Jabar dalam Pemilu melalui hal-hal preventif dan penegakan hukum. Selain itu disampaikan pula mengenai strategi lain yang dilakukan Polda Jabar dalam pengamanan Pemilu 2019, yaitu dengan meningkatkan sinergi Polri dan TNI serta instansi terkait.

Lebih lanjut Wakapolda Jabar mengatakan kerawanan yang diprediksi terjadi pada Pemilu 2019 adalah adanya penyebaran hoaks, penyelenggara Pemilu yang tidak profesional, *money politic*, keterlambatan logistik Pemilu, adanya unjuk rasa, konflik sosial dan kerusuhan, pemungutan dan penghitungan suara yang memerlukan waktu yang lama. ■ hr/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/5). Foto: Eka Hendra

Komisi V Pertanyakan Persiapan Mudik Lebaran 2019



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin Rapat Kerja Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Indonesia (Korlantas Polri), di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5). Foto: Azka

Komisi V DPR RI mempertanyakan persiapan mudik Lebaran 2019 kepada para mitra kerjanya, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Indonesia (Korlantas Polri).

“Rapat Koordinasi ini difokuskan pada persiapan mudik lebaran dari berbagai sisi, seperti infrastruktur, kelaikan moda transportasi, termasuk di dalamnya kenaikan harga tiket,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin Rapat Kerja di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Dilanjutkannya, kondisi infrastruktur jalan yang memadai menjadi satu faktor utama dalam kelancaran, kenyamanan dan keamanan mudik Lebaran. Terutama di beberapa

titik rawan kecelakaan. Dalam hal transportasi darat, pihaknya berharap penyelenggara angkutan, baik transportasi darat, laut, dan udara agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, lanjut politisi Partai Gerindra itu, Komisi V DPR RI juga berharap agar pemerintah dan Polri juga menjelaskan mekanisme yang akan diterapkan untuk memperlancar arus mudik, termasuk adanya rekayasa lalu lintas jalan nasional dan jalan tol.

“Pertama di transportasi darat, harus dipastikan kelaikan moda transportasi darat itu aman, dan betul-betul dilakukan pengecekan. Serta mekanisme yang akan diterapkan untuk memperlancar arus mudik, termasuk di dalamnya kebijakan rekayasa lalu lintas,” jelasnya.

Begitupun dalam transportasi laut. Ia tidak ingin insiden kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba pada tahun lalu kembali terulang. Sementara terkait transportasi udara,

hal yang menjadi sorotan Komisi V DPR RI selain kelaikan moda transportasi udara, juga kenaikan harga tiket yang sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir.

“Untuk transportasi udara, selain kelaikan moda transportasi udara, yang menjadi sorotan kami dan tentunya keluhan masyarakat adalah melambungnya harga tiket pesawat tujuan domestik. Kami berharap Menteri Perhubungan terus mengawasi tarif batas atas dan tarif batas bawah tiket pesawat,” tegas Fary.

Diakui politisi dapil NTT II itu, Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan surat terkait dengan penentuan tarif batas atas. Namun sayangnya masih ada maskapai penerbangan yang menetapkan harga di atas tarif batas atas yang telah ditentukan. Oleh karena itu pihaknya berharap agar Menhub bertindak tegas terhadap maskapai yang melanggar hal tersebut. ■ ayu/sf

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa *nggak* tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan,

Jakarta, Kamis (16/5).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Politisi Partai Golkar ini juga menilai bahwa TBA yang ditetapkan sudah sejalan dengan keselamatan penumpang. “Sudah benar ini tarif batas atas, kalau

diturunkan menjadi sangat murah, ini sangat bahaya karena mengenai keselamatan penumpang. Memang harus diakui, sekarang sepi. Makanya kalau memang ingin murah bisa naik LCC (Low Cost Carrier). Hanya saja kan masyarakat tidak bisa seperti itu, untuk itu harus segera disesuaikan,” pungkasnya.

RDP menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya Komisi VI DPR RI mengimbau jajaran Kementerian BUMN untuk terus melakukan optimalisasi dan pengawasan, serta ikut bertanggung-jawab terhadap BUMN terkait transportasi dan asuransi kecelakaan dalam memberikan pelayanan arus mudik dan arus balik dengan tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, lancar dengan harga yang terjangkau dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ■ alw/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). Foto: Andri

Pertamina Harus Jaga Ketersediaan BBM



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu beserta Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group, di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/5). Foto: Hendra

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengingatkan Pertamina untuk menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini menjadi sorotan karena diperkirakan jumlah pengguna BBM tahun ini akan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

“Ini ritual tahunan ya. Kami mendorong kepada Pertamina untuk menjaga ketersediaan BBM menjelang hari raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei. Terkhusus di Medan dan sekitarnya, karena diperkirakan jumlah pengguna BBM tahun ini akan mengalami kenaikan,” ujar Gus Irawan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group, di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/5).

Gus Irawan pun mengakui selama menjelang dan sesudah perayaan Idul Fitri bisa dipastikan konsumsi BBM meningkat dari hari biasanya. Sehingga Komisi VII DPR RI patut memastikan ketersediaan BBM, khususnya di Sumut agar aman terkendali.

“Ya memang konsumsi bahan bakar pasti meningkat menjelang Idul Fitri karena masyarakat pasti akan melakukan mudik ke kampung halaman. Karenanya kita datang ke TBBM Medan Group guna memastikan ketersediaan BBM di Medan aman. Alhamdulillah sudah dijelaskan tidak ada kendala,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun juga mengapresiasi kinerja yang sinergi antara Pertamina dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memetakan sejumlah titik yang berpotensi terjadi kelangkaan BBM. Sinergi itu dituangkan melalui

pembentukan satgas.

“Sudah dibentuk satgas dan posko guna melakukan pemetaan terhadap titik yang berpotensi terjadi kelangkaan BBM. Dan segala macam potensi itu sudah diantisipasi. Seperti Brastagi, dimana potensi pariwisata disana cukup besar saat libur panjang Idul Fitri. Nah, stok BBM di sana harus diperkuat,” terang legislator dapil Sumut II ini.

Gus Irawan optimis Pertamina mampu menjaga ketersediaan BBM di Sumut. TBBM Medan Group yang berlokasi di Belawan dan Labuhan Deli, selaku unit operasi yang berfungsi menjaga suplai dan distribusi harus siap siaga menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi. Turut serta dalam Kunspek ini Anggota Komisi VII DPR RI Taslim Aziz (F-Gerindra), Zulfan Lindan (F-Nasdem) dan Abdul Wahab Dalimunthe (F-Demokrat). ■ hs/sf

Stok Energi di Riau Mencukupi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat meninjau Terminal BBM Sei Siak, Pekanbaru, Riau, Jumat (19/5). Foto: ???

Selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 2019 di Provinsi Riau, pasokan energi sangat mencukupi. Ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Elpiji untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri tak ada kendala apapun. Untuk BBM, pasokan yang paling dibutuhkan di Riau ternyata jenis premium.

Demikian terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan para

mitra kerja bidang energi di Terminal BBM Sei Siak, Pekanbaru, Riau, Jumat (19/5). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir yang memimpin pertemuan mengatakan, semua regulasi dan operator di bidang energi harus berjalan baik. Termasuk cadangan energi yang dibutuhkan masyarakat juga harus siap.

“Kita minta semua regulasi dan operator berjalan dengan baik dan cadangan yang disiapkan cukup.

Kita harapkan cadangan itu bisa meng-cover semua lini yang menjadi tumpuan stok energi,” harap Nasir usai pertemuan. Selain Pertamina, hadir pula dalam pertemuan tersebut PGN, PLN, BPH Migas, Petra Niaga, Kementerian LHK, dan Polda Riau.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyerukan agar Pertamina Riau meyakinkan masyarakat atas kebutuhan pasokan premium di setiap SPBU. Pada puncak hari Lebaran, aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat tajam, sehingga dibutuhkan ketersediaan BBM yang memadai.

“Premium harus benar-benar ada di setiap SPBU dan stoknya *ready*, karena aktivitas masyarakat di hari H Lebaran cukup tinggi. Dan aktivitas pengangkutan ke seluruh jalur BBM juga harus diyakinkan baik,” kilah Nasir lebih lanjut. Sementara itu, kebutuhan listrik sangat memadai selama Ramadan. Hanya saja saat hari lebaran, kebutuhan listrik rumah tangga justru turun drastis, karena banyak rumah yang ditinggal mudik penghuninya. ■mh/sf

Komisi VII Tinjau Persiapan Pertamina Hadapi Arus Mudik Lebaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meninjau persiapan PT. Pertamina dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2019 di Tol Surabaya-Kertosono. Ridwan mengatakan geliat peningkatan aktivitas masyarakat di bulan Ramadan biasanya mulai terasa 15 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan energi, khususnya Premium dan Elpiji bersubsidi mulai naik melampaui kebutuhan normal harian.

“Alhamdulillah Pertamina sangat siap, terutama yang di Provinsi Jawa Timur. Tol Jakarta sampai Surabaya sudah terkoneksi dan perkiraan penumpukan pengisian BBM mungkin akan terjadi di Jawa Tengah dan Pertamina sudah mempersiapkan kebutuhan BBM tersebut di seluruh Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. Pertamina sudah menyiapkan mobil-mobil

dispenser apabila terjadi kemacetan dan *ambulance*,” ujar Ridwan saat meninjau SPBU *rest area* KM 726 Tol Surabaya-Kertosono, Jumat (17/5).

Politisi Partai Golkar itu mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengisi BBM apabila tangki mobil sudah setengah atau bahkan mendekati habis, agar tidak terjadi penumpukan pengisian BBM di berbagai SPBU Jawa Tengah. Di sisi lain, Ridwan mengaku cukup puas dengan penjelasan dari Direktur Retail PT. Pertamina Mas’ud Khamil, sehingga tinggal menunggu implementasinya di lapangan.

Sebelumnya, Direktur Retail PT. Pertamina Mas’ud Khamil menjelaskan, pihaknya akan menerapkan Program Ramadhan Idul Fitri (RAFI) 2019 untuk menghadapi arus mudik Lebaran di Tol Merak-Probolinggo sepanjang 920 KM. Adapun layanan BBM satgas RAFI di SPBU Jawa Madura +/- 3.400 unit

dan disediakan juga motor kemasan 200 unit yang membawa BBM untuk menjangkau area-area tertentu. Untuk Elpiji, Pertamina sudah menyiapkan 638 SP(P)BE, 3.094 agen dan 31.012 pangkalan siaga. Apabila ada kendala, masyarakat bisa langsung membuat pengaduan di *call center* 135 dengan kode area masing-masing di depannya.

■ eno/sf

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat meninjau persiapan PT. Pertamina dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2019 di Tol Surabaya-Kertosono Jumat (17/5). Foto: Anief/JK



Komisi VIII Apresiasi Halal Center Unissula

Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto mengapresiasi atas didirikannya Halal Center Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di Semarang, Jawa Tengah. Diharapkan hadirnya halal center tersebut dapat mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman serta jasa.

“Kita tahu sebagian besar penduduk Indonesia itu Islam, tapi ironisnya justru sebagian besar masyarakat kita justru belum terbiasa budaya sertifikasi produk halal,” papar Wenny di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis ke Unissula, Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/5).

Kunjungan tersebut membahas persiapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mensosialisasikan dan memberikan pedampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat, seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Diakui Wenny, sebagian besar masyarakat Indonesia muslim,

namun masih belum memahami dan menyadari pentingnya standar halal suatu produk. Di sisi lain, gaya hidup halal (halal lifestyle) telah menjadi tren global dan memiliki peluang ekonomi. Sehingga jaminan produk halal bukan tentang Indonesia saja tetapi juga bagaimana menjawab tantangan perekonomian di era perdagangan bebas saat ini, seperti ekonomi di wilayah ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, sebelum UU JPH diberlakukan, sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Namun, terbitnya PP sebagai aturan turunan dari UU JPH tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia. “Sekarang tugas dari pemerintah adalah membuat masyarakat bisa memahami adanya UU JPH

itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Rektor Unissula Prabowo Setiyawan menyampaikan dasar pertimbangan dibentuknya Halal Center yang baru berjalan sejak bulan Maret lalu. Menurutnya, Unissula mempunyai tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan produk halal. Pihaknya juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan kepada pelaku UMKM dan masyarakat tentang pentingnya jaminan produk halal.

Ia menambahkan, produk berlabel halal memiliki daya saing lebih tinggi. Tercatat, potensi halal market global semakin meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan terus naik hingga pada tahun 2030. “Permintaan

sertifikasi produk halal saat ini justru datang dari negara non muslim. Sebagai contoh Korea Selatan yang kini memiliki perhatian terhadap persoalan halal karena produk barang dan jasa mereka,” tutup

Prabowo. ■

ann/sf



Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Unissula, Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/5). Foto: Larisa

BBPLK Semarang Mampu Lahirkan Pekerja Profesional

Komisi IX DPR RI menyambangi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui sejauh mana Balai Latihan Kerja (BLK) dapat berkontribusi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki *skill*.

Dalam peninjauan tersebut, Tim Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi atas capaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh BBPLK Semarang.

“Khusus untuk di BLK Semarang yang kita kunjungi ini adalah BLK yang cukup bagus. Kita melihat mereka melakukan program-program yang luar biasa, dan bisa melatih sekitar 3 ribu siswa dalam setahun. Alumni pelatihan di sini bisa langsung diterima di dunia usaha,” ungkap Saleh usai memimpin pertemuan Panja dengan Gubernur Jawa Tengah, *stakeholder* terkait, serta para pengusaha yang tergabung dalam Apindo, di Semarang, Jateng, Jumat (17/5).

Hasil karya dari siswa-siswa di BLK Semarang ini memang luar biasa baik, sambungnya. “Tarafnya bukan hanya nasional, tetapi sudah bertaraf internasional. Bahkan saya dengar BLK ini juga sudah mendapatkan tawaran-tawaran kerja sama dengan negara lain, seperti negara Timur Tengah, untuk memproduksi busana-busana muslim. Kita doakan semoga bisa terjalin kerjasama, dengan begitu BLK ini akan semakin eksis,” tutur Saleh.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat meninjau kegiatan BBPLK Semarang Jateng, Jumat (17/5). Foto: Devi

Dikatakannya, hal lain yang tak kalah penting adalah keberhasilan BLK ini bisa ditularkan ke BLK di daerah lain. “Kalau itu bisa terwujud, maka akan dapat menciptakan lapangan usaha yang begitu besar. BLK (yang berhasil) seperti ini di Indonesia jumlahnya (masih) tidak banyak, hanya ada sekitar 21 BLK yang tersebar di beberapa daerah, dan (jumlahnya) itu harus diperbanyak. Hal ini akan menjadi rekomendasi dari Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, agar menjadi fokus perhatian mereka,” ujarnya.

Saleh juga menyampaikan, kendala yang masih dihadapi saat ini adalah terutama dari sisi anggaran. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk melaksanakan revitalisasi seperti ini. “Untuk itu kita akan mendorong supaya anggarannya

bisa dimaksimalkan. Selain itu, persoalan lainnya ialah dari sisi pegawai pelatih PNS. Berdasarkan paparan yang disampaikan Kemnaker kepada Komisi IX DPR, mereka masih kekurangan sekitar 5 ribu PNS untuk diterjunkan langsung ke BLK - BLK sebagai pelatih,” papar Saleh.

Menurut Saleh, politisi F-PAN itu, hal ini merupakan pekerjaan yang cukup luar biasa besar, dimana (dibutuhkan) sejumlah 5 ribu PNS baru sebagai tenaga pelatih Hal itu juga menjadi PR tersendiri yang harus dikerjakan oleh Kemnaker. “Tetapi kita akan tetap mendorong pemerintah untuk memenuhi hal itu, karena saat ini pemerintah juga ingin mendorong bagaimana agar supaya jumlah pengangguran bisa dikurangi lebih cepat dan lapangan pekerjaan yang tercipta jumlahnya juga semakin banyak,” tutupnya. ■ dep/sf

Serapan Tenaga Kerja Harus Seiring Kualitas SDM

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menuturkan, masalah ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang harus bersamaan dengan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karenanya, diharapkan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjawab tantangan tersebut.

"Ketenagakerjaan ini juga menyangkut kualitas, sehingga kualitas ini menjadi catatan penting bagi kita," ujar Ermalena saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Revitalisasi BLK dan pengembangan Latihan Kerja Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta, Jumat (17/5). Turut hadir Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Eko Wisnu Wardhana dan Kepala UPTD BLK Kulon Progo Saryono.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan hadirnya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo diharapkan memberikan peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Namun, peluang besar tersebut harus disokong dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan sesuai kebutuhan industri.

Ia menambahkan, dalam hal ini peran aktif BLK sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan tersebut. Ia juga berharap, BLK terus berbenah menghadapi era industri 4.0, BLK harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring

perkembangan teknologi digital.

"Era industri 4.0 ini harus disikapi dengan kesiapan kita agar lapangan pekerjaan yang dibutuhkan ke depan terisi anak-anak kita, dan itu perlu waktu. Kita harap BLK hadir memberikan pendampingan. Jangan sampai anak-anak Kulon Progo menjadi penonton di tempatnya sendiri. Diharapkan, anak-anak mampu mengisi tempat atau posisi strategis," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan dibangunnya New Yogyakarta International Airport (NYIA) harus dimanfaatkan bagi calon pekerja, bukan hanya untuk sekedar mengisi kekosongan peluang kerja namun juga diimbangi dengan kualitas yang baik pula.

Dalam hal ini, BLK bisa dikatakan

”

...PENYERAPAN TENAGA KERJA YANG HARUS BERSAMAAN DENGAN PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. "Oleh karena itu pemerintah menginisiasi program Reorientasi, Revitalisasi, dan *Rebranding* BLK yang memfokuskan pada SDM melalui pembinaan kejuruan yang mudah dan terarah, peningkatan kualitas dan kuantitas kejuruan unggulan, pembinaan instruktur serta peningkatan reputasi BLK," tutupnya. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat kunjungan kerja spesifik terkait revitalisasi BLK dan pengembangan latihan kerja Kab, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Juma'at (17/05/2019). Foto:Ann/Man

Komisi X Minta Kuota dan Nilai Beasiswa Bidikmisi Ditingkatkan

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan jumlah kuota penerima dan besaran nilai Beasiswa Bidikmisi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar) mengungkapkan, kehadiran Beasiswa Bidikmisi ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, peningkatan Beasiswa Bidikmisi ini juga dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu diungkapkan Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Riau (UNRI), Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Kepala LLDikti Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri, dan Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Rektorat Kampus UNRI, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (16/5).

“Kita ingin ke depan dalam rangka meningkatkan SDM adalah memberikan akses kepada siapapun yang memiliki keinginan untuk melanjutkan

pendidikan. Walaupun sekarang wajibnya hanya sampai pendidikan dasar, tapi ke depan kita ingin semua warga negara bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Ke depan akan diubah jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Mudah-mudahan (langkah ini) bisa memperluas akses peningkatan Beasiswa Bidikmisi, baik jumlah maupun besarnya,” harap politisi dapil Kalimantan Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan (F-Demokrat) mendorong Beasiswa Bidikmisi dikembalikan lagi kepada

marwah dari pendidikan, karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan ini dari pemerintah. Ia sepakat dengan Komisi X DPR RI untuk mendorong Kemenristekdikti meningkatkan besaran nilai dan jumlah kuota penerima Beasiswa Bidikmisi.

“Peningkatan itu bukan hanya jumlah penerima, tapi juga nominalnya harus ada penambahan. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kurang mampu. Bagi perguruan tinggi yang merasa kurang mendapatkan kuota penerima Beasiswa Bidikmisi, jika ini terkait dengan regulasi, maka harus kita ubah. Sehingga yang betul-betul membutuhkan, harus dapat Beasiswa Bidikmisi,” dorong legislator dapil Jawa Timur IV itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) menemukan ada sejumlah Perguruan Tinggi (PT) yang justru menolak

Beasiswa Bidikmisi, karena besaran nilainya dianggap terlalu kecil, sekitar Rp 2,4 juta per semester. Hal ini kontra dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah PT yang mencapai Rp 10 juta. Padahal, jika mahasiswa telah



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Rektorat Kampus UNRI, Pekanbaru, Riau, Kamis (16/5). Foto: Sofyan



mendapat Beasiswa Bidikmisi, dan besarnya jauh lebih kecil dibanding UKT, maka PT tidak boleh menarik iuran apapun dari mahasiswa itu. Akhirnya, banyak PT merasa keberatan.

“Persoalannya karena nominal yang diberikan Beasiswa Bidikmisi sekitar Rp 2,4 juta. Sementara UKT-nya bisa lebih besar dari itu, sehingga tidak mudah bagi perguruan tinggi untuk mengatasi, karena tidak boleh menarik iuran dari mahasiswa, sehingga banyak PT yang keberatan ketika menerima Beasiswa Bidikmisi itu. Termasuk juga ada berita nilai uang pendampingannya akan turun, ini yang harus didorong. Karena

efeknya, mahasiswa tidak mampu, tidak bisa kuliah,” tandas legislator dapil Jawa Barat I itu.

Terkait beasiswa itu, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti Didin Wahidin juga berharap pendidikan di seluruh tingkat menjadi gratis. Namun karena minimnya anggaran negara, sehingga harus ditangani secara bertahap. Namun ia memastikan, kesempatan untuk mengakses Beasiswa Bidikmisi akan lebih luas. Termasuk Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk mahasiswa di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Tahun ini secara keseluruhan ada 500 ribuan mahasiswa yang mendapat beasiswa. Kita harap tahun depan setidaknya 400 ribu bagi mahasiswa yang baru masuk. Kita berharap ada anggarannya. Sudah dijanjikan sekitar 250 ribu, hampir OK. Kenaikannya 2 kali lipat tahun depan,” imbuh Didin. Dalam pertemuan itu terungkap sejumlah permasalahan di PT, diantaranya kelembagaan, akreditasi, Beasiswa Bidikmisi, banyaknya dosen ASN yang memasuki masa pensiun, hingga minimnya sarana dan prasarana. ■ *sf*

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perlu Dikaji

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkapkan, selama ini yang menjadi acuan akreditasi program studi (prodi) pendidikan tinggi merupakan standar pendidikan tinggi nasional. Namun dari hasil evaluasi dan rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Panja Standar Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI mengungkap bahwa perlu ada kajian dan peninjauan ulang tentang standar nasional pendidikan tinggi itu sendiri.

“Artinya dalam konteks penentuan akreditasi pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi nasional nanti tidak bisa semerta-merta semua diseragamkan antara yang berakreditasi C dengan B, atau antara yang berakreditasi B dengan A itu tidak bisa disamaratakan,” ungkap Ferdi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta di DI Yogyakarta, Kamis (16/5).

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, Komisi X DPR RI merekomendasikan agar ada keragaman standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan klaster-klaster, karena Indonesia tidak semuanya bisa diambil keputusan secara menyeluruh.

Ada bagian yang bisa dilakukan secara menyeluruh, namun ada juga bagian yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

“Maka konteks kunjungan ini adalah untuk mengambil intisari mana bagian-bagian itu, baik mengenai kelembagaan dan akreditasi mana yang bisa dilakukan secara menyeluruh merata seluruh Indonesia dan ada juga yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan klaster-klaster dunia pendidikan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Ferdi menambahkan, terkait prodi yang diusulkan oleh masyarakat dan dinilai berdampak positif baik ekonomi, ekonomi, dan sosial, pastinya Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi. Namun Ferdi meminta agar setiap pengajuan prodi yang baru harus dengan kajian dan tolok ukur yang jelas, bahwa dibukanya prodi itu akan berdampak positif.

Sebelumnya, legislator dapil Jawa Barat XI itu mengungkapkan, kunjungan ini memiliki dua tema besar, yakni terkait tantangan dan hambatan kelembagaan dan akreditasi di Perguruan Tinggi Negeri PTN, baik yang berstatus PTN-Satker, PTN-BLU maupun PTN-BH dan Perguruan Tinggi Negeri (PTS). ■ *skr/sf*



Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke UPN Veteran Yogyakarta, DIY, Kamis (16/5). Foto: Singgih

Disparitas Harga Komoditas **Sebabkan Inflasi di Jatim**



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Surabaya, Kamis (20/5). Foto: Anief

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur terkait dengan inflasi adalah adanya disparitas harga komoditas pada sejumlah kabupaten/kota yang masih relatif tinggi pada kawasan yang sama pada Bulan Ramadan dan

menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Menurutnya, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus menunjukkan perannya.

“Meningkat pada momentum ini terjadi kenaikan harga-harga di masyarakat yang menjadi keluhan masyarakat,” kata Soepriyatno usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim dan Kepala TPID Jatim, di Surabaya, Jatim, Kamis (16/5).

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini berharap BI maupun TPID dapat melaksanakan fungsinya serta mengambil langkah-langkah yang efektif supaya kenaikan harga-harga tersebut tidak membebani masyarakat. “Faktor lain yang perlu diwaspadai adalah tekanan inflasi pada kelompok *administered price* seperti

tarif angkutan serta sejumlah komoditas pangan yang memiliki kecenderungan mengalami kenaikan harga pada masa Ramadan seperti telur ayam ras dan daging ayam ras,” imbuh Soepriyatno.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate menambahkan, dampak kenaikan harga rata-rata di pasar, khususnya komoditas pangan relatif terkendali dan inflasi tidak naik terlalu banyak. Menurutnya ini hal yang sangat positif, karena seluruh instrumen negara dan pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap inflasi secara baik.

“Bank Indonesia mengantisipasi secara tepat dengan melakukan intervensi terukur, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah bisa terjaga. Maka pengendalian harga rata-rata di pasar juga khususnya pada komponen-komponen impor menjadi lebih baik,” tutup politisi Partai NasDem ini. ■ afr/sf

Inflasi Sumut Masih Terkendali

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara memperkirakan, laju inflasi Sumut pada bulan Mei akan cukup tinggi. Hal ini seiring penumpukan beban kenaikan harga akibat bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan depan. Sumut mengalami inflasi hingga 1,42 persen mtm (month to month) pada April 2019, meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 (0,43 persen). Walau ada kenaikan, inflasi Sumut masih menjadi yang terendah di antara 34 provinsi di Indonesia.

“Saya mengapresiasi kepada koordinasi yang baik dari pihak yang telah bekerja memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung atas terkendalinya inflasi di Sumut ini,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Medan, Sumut, Jumat (17/5).

Dalam penjelasan BPS, secara rinci digambarkan tingkat inflasi seluruh provinsi di Indonesia secara nasional dan pada Bulan Januari-April 2019, “Tekanan inflasi Sumut pada tahun 2019 yang hanya 1,42 persen ini jauh lebih rendah dari inflasi nasional yang berada pada angka 3,13 persen. Angka 1,42 persen ini juga merupakan terendah di 34 provinsi,” jelasnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, inflasi Sumut selama tahun 2018 dapat terkendali dengan baik, dan ketersediaan serta keterjangkauan harga barang dan jasa selama tahun 2018 juga dapat terjaga dengan baik dan terkendali.

Marsiaman mengatakan, terkendalinya ketersediaan serta keterjangkauan harga barang dan jasa, sehingga harga kebutuhan pokok dan bahan strategis

lainnya relatif stabil selama 2019, juga didukung oleh kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumut. “Apabila inflasi itu terkendali, mempunyai pengaruh yang positif, dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi di Sumatera Utara,” pungkas legislator dapil Riau

II itu. ■ man/sf



Anggota Komisi XI DPR RI, Marsiaman Saragih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Perwakilan BI Medan, Sumut, Kamis (16/5). Foto: Andri

Komisi XI Apresiasi TPID Sulsel Kendalikan Inflasi



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Amir Uskara Menyerahkan Cendera Mata Dengan Salah Satu Mitra Kerja, Makassar, Sulsel, Kamis (16/5). Foto: Ayu

Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan tekanan inflasi yang rutin terjadi di Bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga inflasi tidak terlalu tinggi.

“Sepertinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui TPID-nya sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan terjadinya inflasi yang rutin terjadi menjelang hari-hari besar, termasuk hari raya Idul Fitri tahun ini. Sehingga inflasi yang terjadi pun tidak terlalu tinggi atau dalam arti masih terkendali,” ujar Amir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja

”

...INFLASI YANG TERJADI PUN TIDAK TERLALU TINGGI ATAU DALAM ARTI MASIH TERKENDALI,”

Spesifik Komisi XI DPR RI ke Makassar, Sulsel, Kamis (16/5).

Dilanjutkan politisi PPP itu, selama ini ada beberapa program yang telah dilakukan TPID Sulsel dalam mengendalikan inflasi. Pertama terkait ketersediaan stok bahan pangan yang dibutuhkan seperti beras, daging, ikan, bawang merah dan cabai. Termasuk

di dalamnya juga bagaimana mengatur agar rantai distribusi tetap lancar. Karena tidak dapat dipungkiri hal tersebut sering menjadi kendala.

Kedua, *stakeholder* terkait seperti Bulog yang juga masuk dalam TPID juga menggelar operasi pasar. Hal ini untuk memastikan kewajaran dari harga-harga bahan pokok di pasaran, atau dengan kata lain melakukan stabilisasi harga. Selain itu juga dilakukan kegiatan pasar murah, serta berbagai kebijakan lainnya.

“Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sulawesi Selatan tersebut, saya yakin masyarakat Sulawesi Selatan dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” pungkas politisi dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini. ■ [ayu/sf](#)

Momentum Harkitnas, Sekjen DPR Ajak Seluruh Pihak Rawat Kebhinekaan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, yang paling relevan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-111 adalah memaknai kebhinekaan Indonesia, seperti apa yang telah diamanatkan oleh Presiden Pertama Indonesia Bung Karno, bahwa yang paling utama adalah merawat kebhinekaan dengan gotong royong dan menghargai perbedaan.

“Bung Karno mengatakan yang paling utama adalah merawat kebhinekaan ini dengan gotong royong dengan menghargai perbedaan-perbedaan,” kata Indra usai memimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-111 dengan tema “Bangkit Untuk Bersatu”, di Halaman Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5). Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyematan Satya Lencana Karya 30 tahun kepada 11 orang karyawan Setjen dan BK DPR RI.

Indra menambahkan, semangat Kebangkitan Nasional bagi karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sudah cukup baik. Sementara di dalam sambutan pidato Menkominfo yang dikutip Indra, bahwa dengan adanya bentangan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, Indra sepakat bahwa perbedaan itu adalah suatu kekayaan yang harus dijaga dengan baik.

“Dan teman-teman di kesetjanaan MPR, DPR, dan DPD RI, saya kira selama ini sudah melaksanakan itu dengan baik dengan merawat perbedaan-perbedaan

itu, baik perbedaan suku, agama, dan ras. Dan itu juga pernah dicita-citakan oleh Maha Patih Gajah Mada bagaimana dia bersumpah untuk mempersatukan Nusantara. Maka jangan sampai apa yang selama ini sudah dibangun oleh para pendiri bangsa itu terkoyak oleh hal-hal yang memang itu tidak mendukung semangat gotong royong,” ungkapnya.

Mengutip pidato Harkitnas dari Menkominfo, bahwa Indonesia berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi, dimana hal itu juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. “Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam Pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita,” imbuhnya.

Menurut Indra, terkait dengan telah diselenggarakannya pesta demokrasi beberapa waktu lalu, dirinya mengapresiasi perbedaan pilihan yang ada di sekitar ASN, karena perbedaan pilihan politik sangatlah wajar dan diperbolehkan oleh Undang-Undang (UU). Hal itu merupakan bagian dari keberagaman, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya dapat disikapi dengan bijak.

“Sehingga perbedaan-perbedaan itu hendaknya tidak menjadi suatu perbedaan yang menyebabkan adanya keretakan, biarlah itu perbedaan politik. *Toh* nanti kita semua akan laksanakan dengan baik, apapun hasil politik negara. Karena nanti secara resmi lembaga resmi akan mengumumkan hasil dari Pileg dan Pilpres seperti apa, ya kita ASN sudah tentu harus mendukung keputusan itu,” tutupnya. ■ ndy/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar Saat Memimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-111 di Halaman Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Senayan, Senin (20/5). Foto: Kresno

Ittama DPR Kembali Sosialisasi Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan PMPZI

Inspektorat Utama terus memberi pemahaman pengisian lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Program Zona Integritas (PMPZI). Salah satunya dengan kembali menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada jajaran eselon satu di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

“Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi dan bimtek yang telah kita lakukan di DPR (Kamis, 9 Mei 2019). Karena ada perbedaan dalam pengisian PMPRB, maka perlu terus dilakukan sosialisasi dan bimtek secara masif,” jelas Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha usai membuka sosialisasi dan bimtek pengisian PMPRB dan PMPZI di Tangerang, Banten, Kamis (16/5).

Dijelaskan Totok, sapaan akrab Setyanta Nugraha, perbedaan pengisian PMPRB tahun ini, yaitu pertama, objek evaluasi tahun ini yaitu instansi pemerintah dan unit kerja. Kedua, survei internal dilakukan di organisasi dan integritas jabatan. Terakhir pengungkit melihat hasil dan proses. “Tahun lalu, objek evaluasi hanya instansi pemerintah. Survei internal dilakukan

di organisasi dan pengungkit hanya melihat proses,” jelasnya.

Menurut Totok, keberhasilan Reformasi (RB) tidak hanya dilihat dari upaya, tetapi juga hasil yang dirasakan oleh *stakeholder*.

“*Stakeholder* kita itu Anggota Dewan, pasangan kerja/ mitra kerja dan masyarakat umum yang biasanya adalah pemohon informasi. Nah, kita ini memberikan pelayanan terhadap mereka,” jelasnya.

Adapun tahap pengisian, lanjut Totok, pertama adalah meng-*input* PMPRB untuk level unit eselon satu. Kemudian, *input* level organisasi dan inspektorat. Lalu, *review* hasil oleh Setjen dan BK DPR RI pada tanggal 27 Mei mendatang. Terakhir, hasil penilaian dimasukkan ke dalam profil RB nasional di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). ■ rnm/sf



Inspektur Utama DPR RI, Setyanta Nugraha saat membuka kegiatan sosialisasi PMPRB dan PMPZI di Tangerang, Banten, Kamis (31/5). Foto: Tiara



Pengelolaan Dana BOS Diharapkan Lebih Efektif



Kepala PKAKN BK DPR RI, Helmizar saat memimpin diskusi dengan pejabat Kemendikbud di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Kamis (16/5). Foto: Sin

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian (BK) DPR RI Helmizar menilai, pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2015-2018 dianggap masih kurang efektif, karena pembenahan baru dilakukan di tahun 2019.

“Mudah-mudahan di tahun 2020 pengelolaan dana BOS akan lebih efektif dan nanti sekolah-sekolah juga tidak tergantung kepada BOS, tapi bisa lebih mandiri,” katanya usai memimpin diskusi dengan Pejabat Kemendikbud bertema “Efektifitas Upaya Kemendikbud dalam Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program

BOS dan PIP”, di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5).

Lebih lanjut Helmi mengatakan, diskusi yang digelar ini menjadi momentum konfirmasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana BOS di Kemendikbud RI. Mengingat hasil konfirmasi dari Kemendikbud ini akan dilakukan analisis dan pengkajian sebagai bahan masukan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI untuk digunakan sebagai bahan rapat maupun bahan dalam mengambil sebuah keputusan.

Helmi juga menjelaskan, BPK telah mengaudit pengelolaan BOS oleh Kemendikbud dari tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 dilakukan perbaikan pada sistem yang telah mereka buat. Meskipun di sisi lain,

banyak sekolah yang kewalahan terhadap aturan atau sistem baru yang telah dibuat Kemendikbud. Utamanya karena minimnya tenaga operator komputer di tingkat SD dan SMP untuk mengoperasikan sistemnya.

“PKAKN DPR RI akan terus menggali informasi terkait dana BOS, pasalnya dana yang telah digelontorkan untuk dana BOS cukup besar dan setidaknya ada 18 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Maka temuan BPK ke depannya akan terus dipantau dan ditelaah oleh PKAKN DPR RI,” katanya.

Sementara Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Sutanto menyatakan bahwa pihaknya memang telah banyak melakukan perbaikan sistem, seperti sistem Dapodik, sistem data sekolah, guru, siswa, hingga sarpras, sekaligus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang belum melakukan tugasnya dengan baik. Namun, dirinya juga berharap Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi turut andil dalam memberikan dana pendidikan, jadi tidak hanya mengandalkan dari Dana BOS.

“Seharusnya kabupaten dan kota kepada SD dan SMP, dan provinsi kepada SMK dan SMA. Jadi Pemerintah Daerah masing-masing memberikan tambahan (anggaran pendidikan), supaya sekolah punya dana operasional yang cukup, tidak hanya mengandalkan Dana BOS dari pusat saja. Kan sesuai UU 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa kewenangan sudah di bagi-bagi, kabupaten kota mengelola pendidikan SD dan SMP, dan provinsi mengelola SMA SMK dan SLB, itu harusnya sesuai UU,” tutupnya. ■ ndy/sf

Pelayanan RS Pantti Rapih Dinilai Sesuai Prosedur

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai Rumah Sakit (RS) Pantti Rapih di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sudah menjalankan semua prosedur dalam pelayanan kepada pasiennya. Ia melihat pelayanan kepada Anggota Dewan yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) tidak ada masalah.

“Terbukti ada beberapa Anggota Dewan yang berobat di sini. Contoh seperti Roy Suryo yang dilayani dengan

baik. Kalau ada kendala pasti dia sudah telpon saya, tetapi tidak. Artinya RS ini tidak ada kendala,” ucap Agung usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau RS Pantti Rapih, Di Yogyakarta, Kamis (16/5).

Politisi Partai Demokrat itu mengaku mendapat keluhan dari Anggota Dewan yang lain, terkadang ada pihak RS yang harus mengecek Kartu Jamkestama beberapa kali terlebih dahulu, padahal sudah ada *database* dan sudah membawa kartu. Ia menilai seperti itu RS itu belum mendapat penjelasan yang tuntas dari PT. Jasindo sebagai

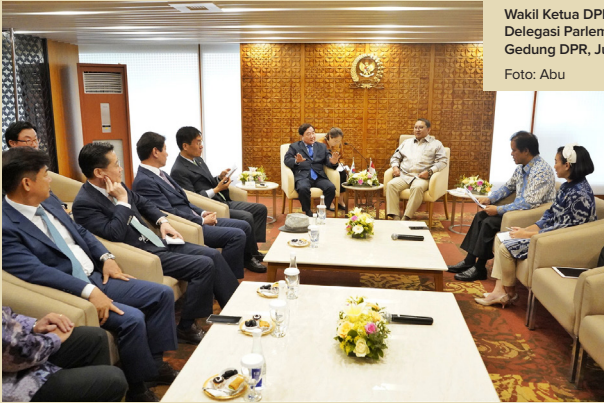
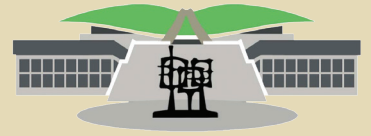
penyelenggara Jamkestama. Agung memastikan akan mengeluasi hal itu dengan mengundang Direksi Jasindo.

“Kalau di RS Pantti Rapih ini sudah cukup baik. Begitu pasien disuruh pulang, ya pulang. Mau pulang pagi boleh, mau pulang siang boleh, artinya tidak ada lagi urusan administrasi yang tertunda dan terhambat. Itulah yang kami temukan di RS ini,” tutur Agung sembari berharap RS Pantti Rapih bisa menjadi contoh seluruh RS yang menjadi provider PT. Jasindo dalam menjalankan program Jamkestama.

■ opi/sf



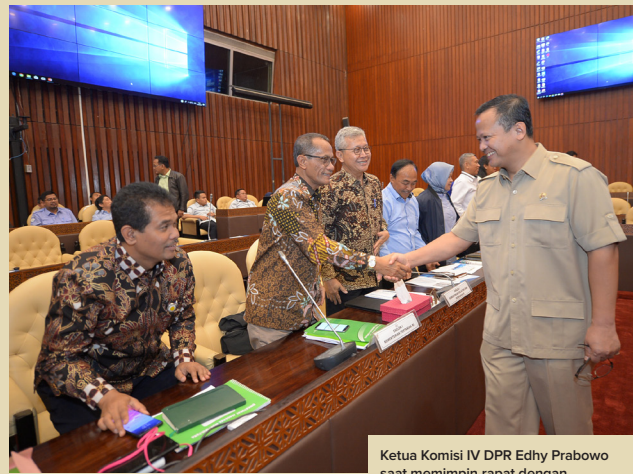
Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau fasilitas RS Pantti Rapih DI Yogyakarta. Foto: Geraldi/eno



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan di Gedung DPR, Jum'at (17/5).
Foto: Abu



Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Rektor Universitas Negeri Semarang, Rektor UNDIP, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kepala LLDikti VI Wilayah Jawa Tengah, dan Kemenristekdikti, Kamis (16/5).
Foto: Surya/jks



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat memimpin rapat dengan Kementerian Pertanian dan Kelautan RI terkait ketersediaan pangan, Rabu (15/5).
Foto: Andri

